

FUNDAMENTALISME AGAMA DAN PENTINGNYA DIALOG LINTAS AGAMA

Hilario Didakus Nenga Nampar¹⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda
e-mail: hilariodidakuspr@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 07-05-2017, disetujui tanggal: 22-05-2017

Kata kunci:

fundamentalisme,
dialog lintas agama.

ABSTRAK

Fenomena fundamentalisme agama, mengajak kita untuk kembali merefleksikan kedalaman penghayatan iman kita. Memang kita rindu agar kebenaran agama kita sungguh dihormati dan dihargai. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa di luar kita ada aneka kebenaran agama yang diimani dan dihayati sesama. Kebenaran agama akan makin sejati saat mau terbuka pada diskursus dan dialog diwarnai rasa ketulusan. Dalam dialog, kebenaran kita akan makin mutlak karena antara kita dan sesama saling melengkapi dan memperkaya. Namun, jika ruang dan peluang diskursus dan dialog tertutup oleh formalis agama semata, rasanya perdamaian makin jauh dari kehidupan kita, dan yang ada hanyalah jerit tangis anak bangsa akibat dilindas oleh “kebenaran mutlak” oknum fundamentalis.

Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No.2, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
Telp. (0541) 739914 | Email: jgvstpkbinainsan@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada era postmodern terdapat banyak kritik mengenai ideologi. Sesungguhnya ideologi adalah sistem rasional berupa suatu paket pemikiran yang menampilkan analisis, promosi pemahaman, dan gagasan rasional. Ideologi itu sebuah abstraksi. Ideologi memproduksi kekuasaan, bukan hanya karena menggagas upaya merebut kekuasaan dan merengkuhnya, melainkan juga karena ideologi selalu menganut rasionalitas yang memiliki target dan tujuan kepentingan. Selain itu, kalau orang berbicara tentang kepentingan, selalu memaksudkan kepentingan pihak-pihak sendiri atau golongan sendiri dan *penendangan* kepentingan pihak lain. Maka *penendangan* kepentingan pihak lain jelas tidak mungkin merupakan wujud rasionalitas. Dalam ideologi rasionalitas mudah bergeser kepada rasionalitas, bahkan *ultrarasionalitas*. Salah satu contohnya ialah fundamentalisme.

Dewasa ini fundamentalisme tidak hanya bergandengan dengan wilayah ideologis melainkan juga agama. Kendati agama adalah domain keselamatan, ia rentan akan cetusan-cetusan ultrairasional. Kehadiran kelompok-kelompok pasukan atau laskar apa saja yang mengarah kepada gaya atau model kekerasan merupakan suatu bentuk ultrarasional. Ideologi memang menyatukan, tetapi sekaligus menyempitkan. Gagasan-gagasan ini nampak secara jelas dalam realita kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, setiap agama dan aliran kepercayaan yang bertentangan dengan kelompok mayoritas, dibatasi ruang geraknya, dipersulit perijinannya, dicekal, bahkan kalau perlu dilenyapkan sekalipun harus dengan jalan kekerasan fisik.

Realita tersebut menginspirasi penulis mengeksplorasi fenomena ideologis agamis sebagai salah satu ideologi ultrairasional yang tengah marak di tanah air. Dalam naskah ini akan diuraikan perihal paham fundamentalisme agama; latar belakang munculnya dan “kebenaran mutlak” yang selalu menjadi jargon yang didengungkan ideologi ini dan sepak terjang ideologi ini di tanah air. Setelah pelbagai ulasan tersebut, penulis akan memaparkan jalan yang harus ditempuh oleh kelompok ini demi mengatasi fenomena ideologi yang ultrairasional.

Modernitas: Menuju Iman Sekular

Fundamentalisme dalam agama tidak terlepas dari sejarah peradaban barat. Meskipun istilah itu muncul pertama kali di Amerika, semangat yang menjiwai gerakan ekstrim itu sudah lama berkobar di Eropa Barat sebelum abad 19-20. Jauh sebelum itu proses modernisasi di Eropa yang sudah merebak sejak awal masa baru di abad 13 dan 14 sampai zaman “pencerahan” pada abad 17 dan 18 secara tidak langsung menanamkan benih-benih pemberontakan melawan proses itu sendiri.¹

Proses modernisasi secara radikal membawa perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan manusia, pada bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, agama maupun pada cara hidup, institusi, dan orientasi hidup manusia. Ciri-ciri kemodernan tampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknik, industrialisasi dan peningkatan kehidupan ekonomis, pemisahan antara agama dan negara dengan berbasiskan pengakuan dan penerapan akan kebebasan beragama, toleransi, penegakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpikir.

Proses ini pada tempat pertama diartikan proses pembawaan kemajuan yang bergerak menuju masyarakat terasionalitas yang tak terikat dengan nilai-nilai religius, bahkan termasuk masyarakat atheistic. Semua orang mendapat tempat dalam masyarakat seperti itu. Akar dari proses itu adalah emansipasi kritis yang berani menentukan nasibnya dirinya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Ketergantungan pada dunia adikorati pun dipertanyakan, apabila rumusan kepercayaan dan tingkah laku keagamaan menindas kebebasan dan emansipasi kritis.

Sejalan dengan arus perkembangan modernisasi yang ditandai oleh masa pencerahan, konsep dan pemahaman terhadap hakekat agama pun berubah secara radikal. Hakekat agama tidak terutama dicari di luar manusia; dalam doktrin-doktrin agama atau kotbah-kotbah pemimpin agama. Maka untuk mengerti dan memahami hakekat agama, orang harus kembali kepada “manusia yang menghayatinya.” Maka dengan demikian pemahaman dan pelbagai ajaran mengenai agama bukanlah menjadi milik paten pemimpin agama yang harus diikuti dengan kepatuhan mutlak. Konsekuensinya ialah janji-janji keselamatan yang menjadi tema sentral pewartaan agama tidak lagi menjadi pedoman etis baku bagi perilaku manusia demi memperoleh “keselamatan” bagi hidupnya. Sebaliknya, dengan kapasitas akal budi yang manusia miliki ia dapat memahami dan mengimani agamanya serta mengejar “keselamatan” bagi hidupnya, tanpa harus menunggu pemenuhan janji-janji keselamatan yang ditawarkan oleh agama.

Sedangkan implikasi lanjutnya ialah dalam penentuan arah kehidupan baik individual maupun masyarakat tidak lagi berdasarkan doktrin-doktrin agama, melainkan pada usaha konkrit untuk memberi jawaban-jawaban yang segera atas persoalan dan tantangan kehidupan yang nyata. Di dalam usaha untuk menjawab persoalan dan tantangan kehidupan kehidupan itulah terletak keselamatan yang sejati, bukan keselamatan yang

realisasinya berada jauh dari kehidupan manusia. Maka kehidupan bermasyarakat terarah kepada usaha untuk mewujudkan “surga di atas bumi yang disini dan kini” dan bukan surga yang masih ada di dunia seberang.”

Kekuatan dan pedoman untuk mewujudkan tujuan nampak jelas dari pemanfaatan teknik dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri modernitas. Melalui sikap ilmiah tanpa spekulasi dan perkiraan yang menjadi ciri teologi agama, ilmu telah membawa masyarakat kepada pengetahuan baru tentang dunia, tentang manusia, kelompok sosial, dan tentang teknik. Ilmu pengetahuan dan teknik akhirnya menggantikan kepercayaan akan hal-hal adikodrati yang diajarkan agama dengan kepastian ilmiah.

Prinsip-prinsip etis perbuatan manusia tidak lagi diukur dan diatur oleh prinsip-prinsip etis agama yang membatasi ruang gerak dan imajinasi, melainkan oleh jati diri manusia yang otonom dan bebas. Itulah yang disebut iman sekuler. Iman yang tidak lagi didasari oleh keyakinan bahwa Allah berkuasa atas hidup manusia dan mampu menjawab segala persoalan kehidupannya sebagaimana yang terus diproklamirkan agama. Sebaliknya, yang menjadi “allah” iman sekuler ini ialah kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memberi jawaban pasti dan konkret atas pelbagai persoalan hidup.

Krisis Iman Sekular; “Allah”nya Tidak Lagi Otonom Malah Membahayakan

Namun ternyata iman sekular manusia modern ini menjadi goyah. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang diagung-agungkannya sebagai “allah”-nya itu tidak lagi otonom malahan membahayakan. Artinya, ilmu sebagai ilmu itu sendiri yang bersifat otonom dan bebas dari ketergantungan dengan faktor-faktor lain di luar bidangnya tidak lagi terjamin. Ilmu pengetahuan berada dalam satu proses yang arah perkembangannya dapat dikendalikan dan ditentukan oleh bidang-bidang kehidupan lain seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akibatnya ilmu pengetahuan mudah dikendalikan kepentingan-kepentingan lain. Hal ini amat mudah dijumpai dalam realita ekonomi kapitalis.

Kapitalisme memang telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Maka untuk menjaga sistem tersebut, para pengambil keputusan sering harus mengorbankan masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi jutaan orang. Di Indonesia, sistem kapitalisme yang *merciless* telah melibas ribuan wiraswastawan bermodal kecil. Kehendak baik segelintir orang tidak dapat mengalahkan kehendak mereka untuk mempertahankan sistem tersebut. Kalkulasi yang berlaku bukan lagi baik atau buruk, melainkan efisiensi atau boros, untung atau rugi. Para wiraswastawan tidak hanya kesulitan mendapatkan modal, tetapi kegiatan ekonomis mereka sudah menjadi bagian dari mata rantai sistem kapitalis yang lebih luas. Para nelayan kelas teri tidak kebagian ikan, karena ikan-ikan sudah diambil para kapitalis dengan alat yang dapat mengeruk ikan secara massif.²

Sistem kapitalisme juga mempengaruhi wajah media massa yang sering dinilai tidak mempunyai jati diri dan visi. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saingnya banyak media massa (terutama TV) “terpaksa” harus menyiarkan program-program picisan tanpa memperhitungkan dampak sosial dan moral. Maka demi daya saing, orang sering mengorbankan pertimbangan-pertimbangan etis. Sedaangkan di Indonesia daya saing sering digantikan dengan kolusi dan monopoli, sehingga akibat yang ditimbulkan menjadi lebih kompleks.

Sistem kapitalisme tidak hanya mempengaruhi wajah media, melainkan juga wilayah perorangan; mempengaruhi orang dalam memandang dirinya dan dalam pengambilan keputusan baik untuk dirinya maupun orang lain. Maka sekedar untuk *survive* orang seringkali harus membayar dengan harga yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang. Dalam kacamata kapitalisme, tubuh manusia dipandang sebagai salah satu unsur kapital yang dapat habis atau mengalami penyusutan dan harus digantikan dengan tubuh (kapital) yang baru. Dalam perhitungan ekonomis kapitalis, wajah yang mengeriput atau payudara yang kempes sejajar dengan mesin diesel yang aus. Dalam sistem kapitalisme, dunia pelacuran masuk ke dalam suatu mata rantai dengan salah satu ujungnya pelecehan terhadap martabat manusia.

Selanjutnya, pengaruh kapitalisme dalam cara pandang manusia atas dirinya sendiri dijalankan dengan mengambil hak Tuhan sebagai pencipta. Di dalam pangkuan kapitalisme manusia bukan lagi suatu anugerah dari Tuhan pencipta, melainkan produk pada dirinya sendiri. Manusia sekarang mampu menciptakan "manusia" untuk mengatakan memproduksi manusia di laboratorium. Manusia kini menjadi sebuah "produk". Manusia sudah sampai pada sumber kekuasaan, di tempat asal eksistensinya sendiri. Muncullah suatu godaan untuk menciptakan manusia yang sempurna, untuk melakukan eksperimen terhadap manusia, untuk melihat manusia seperti sampah yang dapat dibuang.³

Dari pelbagai realita, pemikiran bahkan harapan manusia bahwa dengan pengaplikasian secara mutlak ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan global akan menjadi lebih baik justru berbicara sebaliknya. Orientasi hidup yang berdasarkan kepercayaan akan kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknik justru membuat manusia terasing dari lingkungannya, sesama, alam, bahkan dirinya sendiri. Manusia pun akhirnya tiba pada momen "krisis" saat dimana ia bimbang, ragu, resah, dan gelisah.

Momen "krisis" makin meresahkan manusia ketika pluralisme yang menjadi ciri kebudayaan modern menawarkan "keanekaragaman" prinsip kehidupan. Manusia dipersilakan memilih secara bebas pelbagai prinsip yang *bersliweran* di sekitarnya, tanpa harus tunduk pada satu prinsip yang mengikat semua. Namun, "krisis" yang dialaminya bukannya teratasi, malahan membuat manusia menjadi bingung untuk menetapkan prinsip yang menjadi pegangan hidupnya. Manusia menjadi disorientasi, tidak punya pendirian dan prinsip yang kokoh.

Momen "krisis" ini kemudian membuahkan pemberontakan suara batin yang berinspirasi "agama" oleh karena ketakberdayaan kolektif untuk keluar dari krisis itu. Wujud pemberontakan batin tersebut nampak dalam pertanyaan radikal "Apa akar terdalam yang menjadi milik bersama seluruh umat manusia?" Jawaban atas pertanyaan mendasar ini justru menyentuh apa yang menjadi dasar bersama yang bersifat pasti dan yang berdiri melampaui keanekaragaman atau pluralisme.⁴ Salah satu jawabannya ialah agama.

Fundamentalisme Agama

Thomas Meyer, sebagaimana dikutip Sermada Kelen, dalam artikelnya "*Fundamentalisme dalam Agama*" mengartikan fundamentalisme sebagai suatu gerakan ketertutupan diri yang sewenang-wenang sambil bertendensikan melawan proses modern yang berciri keterbukaan pikiran, keterbukaan tindakan, keterbukaan bentuk hidup dan keterbukaan terhadap hakekat hidup bersama. Gerakan ketertutupan ini menghantar orang kembali kepada kepastian mutlak, pegangan yang kokoh, perasaan aman yang dapat dipercayai dan orientasi yang tak dapat diragukan dengan mengutuk semua alternatif lain

secara irasional. Pengertian seperti ini mencakup semua bentuk gerakan fundamentalisme, termasuk fundamentalisme agama. Manusia menghayati agama dalam semangat permusuhan terhadap masyarakat pluraristik, juga pluralisme agama.

Fundamentalisme dalam agama pasti sudah hilang akibat dilindas ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sayangnya, kerinduan tersebut diekspresikan secara buta melalui pikiran dan tindakan yang mengutuk pelbagai wacana, pandangan, aliran, dan ajaran agama lain yang berseberangan. Hal ini nampak dari pelbagai slogan ideologis agamis, kotbah-kotbah para pemimpin agama, *talk show*, propaganda yang cenderung mendiskreditkan agama lain. Bahkan, sikap fundamentalisme masuk juga dalam ranah kekuasaan lewat pelbagai kebijakan yang diproduksi aparat-aparat pemerintahan. Ketakutan dalam beribadah, penutupan secara paksa bahkan penghacuran rumah ibadah, dan pengusiran yang malahan memakan korban jiwa adalah cetusan-cetusan oknum-oknum fundamentalis yang memang diberi ruang gerak bebas.

Selain itu, fundamentalisme agama ini tertutup terhadap ruang dan peluang diskusi, dialog, negosiasi, bahkan kritik. Diskusi, dialog, dan negosiasi hanya dapat diterima sejauh menguntungkan posisi dan kewibawaan serta kemapanan agamanya. Sebaliknya, terhadap diskusi, dialog, dan kritik yang justru merongrong kemapanan bahkan mengoyahkan iman agama, dipadang layaknya musuh yang diperangi dan dibasmi. Maka tepatlah jika fundamentalisme adalah ideologi yang irasional bahkan ultrairasional.

Klaim “Kebenaran Mutlak”

Agama diklaim sebagai “kebenaran mutlak” karena dipercayai ajarannya bukan berasal dari manusia melainkan dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia melalui utusanNya. Namun yang dipertanyakan, karena agama yang dipeluk manusia di dunia ini lebih dari satu. Selain itu konflik antara umat beragama dan telah menelan korban, adalah akibat klaim masing-masing pihak sebagai pemilik tunggal kebenaran mutlak dan menganggap yang lain tidak benar dan harus tunduk kepadanya bahkan harus dimusnahkan.⁵

Machasin dalam artikelnya yang berjudul “*Kerjasama Antar-Umat Beragama: Pilihan Masyarakat Majemuk*” memandang bahwa klaim kebenaran mutlak dalam agama lahir dari pengetahuan yang dangkal para pengikut agama mengenai agamanya sendiri. Tidak banyak pemeluk agama yang setelah memeluk suatu agama mendalami dan mempelajari khazanah iman agamanya dan “mungkin” mengenal serba sedikit ajaran agama lain. Biasanya pengetahuan mengenai mengenai agama lain justru berasal dari orang seagama yang dalam banyak hal terpengaruh oleh warisan sejarah pertikaian antar-pemeluk agama yang berbeda. Akibatnya agama lain itu dianggap sebagai musuh dan setiap musuh hampir selalu digambarkan secara negatif, bahkan musuh harus diperangi, dikalahkan, dan dibasmi.

Maka dengan demikian, pengakuan bahwa agama sendiri sebagai satu-satunya agama yang benar sangat tidak beralasan mengingat pandangan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat dan sikap yang jujur. Selain itu, pemutlakan kebenaran agama lebih didasarkan pada perasaan emosional kolektif semata. Padahal jika ditelusuri lebih dalam dan jujur, semua agama juga mengakui adanya Tuhan yang kudus. Dan pencerapan manusia terhadap kekudusan Tuhan itu terbatas; tidak dapat ditangkap dan digambarkan secara jelas dan tuntas. Akibatnya konsepsi Tuhan dalam masing-masing agama berbeda-beda tergantung pada penangkapan dan pemahamannya.

Bambang Sugiharto dalam tulisannya yang berjudul "*Pluralisme Agama dan Keutuhan Agama*" berpendapat bahwa pemutlakan kebenaran agama sendiri mengakibatkan iman jatuh pada sekadar doktrin atau dogma, sedang ritual menjadi sistem takhyul. Selanjutnya, kebenaran seperti ini juga tidak mampu menghargai pluralisme yang secara nyata ada dan memadai. Lebih lanjut, ia mengutarakan pemahamannya mengenai apa sebenarnya kebenaran itu. Kebenaran suatu agama merupakan kebenaran mutlak jika kebenaran tersebut terbuka kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada agama lain. Seorang beriman tidak akan sungguh memahami identitas religiusnya yang sejati selama ia tak berani berkomunikasi dengan tradisi religius lainnya. Pencapaian suatu kebenaran mutlak dimungkinkan karena tidak ada satu tradisi religius yang statis dan merupakan sistem tertutup.

Sebaliknya, semua tradisi religius itu ada dalam proses membentuk diri dan berubah. Oleh sebab itu, keunikan dan keabsolutan suatu tradisi religius tidak pertama-tama ditentukan oleh kepastian mutlak dogma-dogmanya, melainkan oleh pengalaman-pengalaman religius autentik yang memungkinkan stabil dalam posisi tertentu serentak memungkinkannya pula berinteraksi mendalam dengan tradisi-tradisi lain menuju kepenuhan kebenaran tradisinya sendiri.

Hal senada disampaikan oleh Gus Dur, lewat tulisannya yang berjudul "Sumbangan Agama-agama Dalam Menopang Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik Indonesia". Bagi Gus Dur, soal apakah kebenaran agama yang dirasakan benar atau tidak adalah urusan pribadi, sebab tiap orang merasakan sendiri kebenaran itu. Tetapi, dalam merasakan kebenaran itu, dia menghormati hak orang lain untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, diperlukan ketulusan untuk menghormati dan mengakui hak-hak orang lain dalam mencapai kebenaran dengan cara yang sudah diyakini. Penghormatan terhadap hak orang lain inilah yang namanya kebenaran, yakni kebenaran yang kitab suci manapun ajarkan.⁶

Realita Tanah Air

Tidaklah dapat dipungkiri fundamentalisme agama di Indonesia berjalan seiring dengan usaha para pemimpin agama untuk merajut simpul-simpul kerukunan lewat pelbagai usaha dialog. Harapan akan toleransi antar umat beragama seakan sirna ketika usaha dialog dicerderai oleh pelbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan "agama", atau "allah". Dalam aksi kekerasan tersebut, Allah dipahami hanya sebagai Allah kelompok. Setiap kelompok mengklaim Allah sebagai miliknya dan Allah yang wajib berpihak pada kelompoknya. Tanda keberpihakan Allah pada suatu kelompok adalah kemenangan dan korban yang minim. Allah dalam waktu yang bersamaan dibayangkan berpihak pada satu kelompok dan memusuhi atau menghukum kelompok yang lain.⁷

Demi nama Allah atau Tuhan, orang tidak segan-segan menghantam sesamanya, membakar perkampungannya, memusnahkan tempat tinggal dan panenannya, mengusir anak-anak (yang tidak termasuk agamanya) bahkan "menghalalkan darah sesamanya". Fundamentalisme agama makin menyengsarakan bangsa, ketika agama mulai merangsek masuk dalam domain politik. Agama menjadi jembatan untuk kepentingan politik atau bahkan kendaraan politik yang bersifat eksklusif. Agama tak lagi menjadi *inner force* yang memotivasi pemeluknya untuk menghayati makna *agree in disagreement*, sebaliknya malah menjadi senjata mendiskreditkan orang lain yang tidak seagama. "kebenaran mutlak" hanya menjadi miliknya, namun harus dipatuhi (atau diimani) pula oleh orang lain.

Agama menjadi institusi yang dapat dipergunakan untuk menindas orang lain yang dianggap tidak sejalan, lebih-lebih tidak segama. Agama menjadi jalan untuk melegitimasi diskriminasi atas dasar mayoritas-minoritas, dimana yang minoritas harus tunduk dan mengikuti aturan agama yang dipeluk oleh kelompok mayoritas. Pluralisme demokrasi diruntuhkan oleh tirani mayoritas.

Inilah paradigma utilitarian yang telah diaplikasikan secara banal dalam ranah agama. Demi keamanan banyak orang, yang kecil itu layak dibubarkan. Manusia lantas dihukum, ditindas, dipenjarakan semata-mata karena tidak menjadi bagian dari kebanyakan. Dia divonis salah secara legal, bukan karena perbuatan dan hidupnya yang jahat, melainkan karena eksistensinya sebagai yang berbeda dengan yang lain. Salah satu contoh nyata paradigma ini ialah kasus Jemaah Ahmadiyah. Terlepas dari apakah keyakinan kelompok ini benar atau salah, sesat atau tidak, pemerintah menegaskan ketentuan yang memiliki delik-delik sanksi legal konkret yang secara mudah menggiring kelompok ini pada diskriminasi dan ketidakadilan.

M. Syafi'i Anwar mengisahkan penderitaan yang harus dialami kelompok Jemaah Ahmadiyah ini akibat delik-delik ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Tetapi, bagaimanapun, hal yang sangat memprihatinkan adalah nasib yang dialami warga Ahmadiyah di berbagai tempat, yang menjadi sasaran amuk massa dan kekerasan dengan memobilisasi massa dengan mengkapitalisasi fatwa MUI dan dalil-dalil agama dengan tafsiran yang tekstual dan eksklusif. Kantor mereka dirusak, masjid disegel, kendaraan dibakar, dan jamaahnya diusir. Televisi CNN melaporkan kejadian di Manis Lor dan Cirebon tentang amuk massa dan beberapa orang Ahmadiyah yang mukanya berdarah-darah. Terlihat pula massa yang mengumandangkan takbir, menyatakan jihad, dan memerangi mereka yang disebutnya sebagai "kafir" dan kelompok sesat yang harus diperangi."⁸

Realita inilah yang oleh Djohan Efendi dilihat sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Baginya, tidak ada penderitaan batin yang lebih memerihkan dibandingkan pelanggaran terhadap seorang beriman untuk menganut keyakinan batinnya yang ia yakini merupakan jalan keselamatannya di dunia dan diakhirat nanti. Kebebasan berkeyakinan bukan pemberian Negara atau golongan mayoritas, melainkan berasal dari Sang Pencipta sendiri.

Menuju Societas Dialogal

Terhadap fenomena fundamentalisme agama di Indonesia, masihkah ada jalan bagi kehidupan bangsa yang toleran? Kalau ada, apa jalan yang harus ditempuh? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi begitu penting dan relevan mengingat betapa kuatnya hantaman fundamentalisme agama. Betapa kuatnya hantaman itu, sampai-sampai terhadap realita kekerasan yang ada di depan mata, anak-anak bangsa lebih memilih untuk diam ketimbang bersuara kritis. Namun, haruskah kita diam?

Jawaban penulis, tidak. Kebebasan beragama harus tetap diperjuangkan sekalipun tidak mudah. Ada pelbagai jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan *societas* yang toleran. Menurut Prof. Armada Riyanto, dalam bukunya "*Berfilsafat Politik*", salah satu jalan yang dapat anak bangsa ini tempuh ialah dialog, sebab kodrat manusia Indonesia adalah dialog. Tidak ada satu pun anak bangsa yang dapat memungkiri bahwa ia hidup, bernafas dan bergerak bersama orang lain, sesamanya. Bahkan tidak dapat dipungkiri juga bahwa sesamanya itu berbeda (keyakinan, agama, aliran, dan pandangan) dengan dirinya.

Dalam makna dialog masuklah pengertian *persahabatan*. Seseorang disebut sahabat semata berada dalam kehadirannya yang mendengarkan, menyapa, berdialog dengan sesamanya. Dalam dialog sebagai sahabat, orang mengalami kepenuhannya sebagai manusia. Persahabatan juga melampaui kesetiaan pada peraturan religius, agama, atau aneka peraturan sakral yang lain. Artinya, segala tindakan ketaatan dan ajaran agama atau peraturan suci tidak akan ada faedahnya jika tidak diterjemahkan dalam sikap-sikap bersahabat, adil, rukun, dan toleran. Ulah kesalehan agama hanyalah formalitas belaka jika dalam hidup kebersamaan hanya dipenuhi ketidakadilan, diskriminasi, dendam, dan berseteru. Cinta akan Allah bukanlah cinta yang sejati ketika demi nama Allah orang dengan buta melindas habis kemanusiaan.

Persahabatan bukanlah tindakan serentak, karena merupakan rangkaian proses tindakan *menjadi sahabat*. Persahabatan itu suatu tindakan penyeberangan dari diri sendiri kepada yang lain secara terus menerus. Penyeberangan ini bukan berarti penghilangan eksistensi, melainkan justru pemenuhan diri manusia sebagai manusia yang secara kodrati tidak mungkin sendirian. Semakin manusia “menyeberang” ke orang lain, semakin menjadi dirinya sendiri. Sebaliknya, semakin ia mengurung diri sendiri, semakin ia tidak manusiawi, karena, mengurung diri berarti menyangkal keberadaan dan peran sesama yang lain.

PENUTUP

Fenomena fundamentalisme agama, mengajak kita untuk kembali merefleksikan kedalaman penghayatan iman kita. Memang kita rindu agar kebenaran agama kita sungguh dihormati dan dihargai. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa di luar kita ada aneka kebenaran agama yang diimani dan dihayati sesama.

Kebenaran agama akan makin sejati saat mau terbuka pada diskursus dan dialog diwarnai rasa ketulusan. Dalam dialog, kebenaran kita akan makin mutlak karena antara kita dan sesama saling melengkapi dan memperkaya. Namun, jika ruang dan peluang diskursus dan dialog tertutup oleh formalis agama semata, rasanya perdamaian makin jauh dari kehidupan kita, dan yang ada hanyalah jerit tangis anak bangsa akibat dilindas oleh “kebenaran mutlak” oknum fundamentalis. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Bosetti, Giancarlo (Ed.). *Iman Melawan Nalar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta dan Nick T. Wiratmoko (Eds.). *90 Menit Bersama Gus Dur*. Salatiga, Yogyakarta: Pustaka Percik, Pustaka Pelajar, 2006.
- Elza, Taher P. (Ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama* Jakarta: ICRP, Kompas, 2009.
- Riyanto, Armada, (Ed.). *Agama anti Kekerasan; Membangun Iman Yang Merangkul*. Malang: Dioma, 2000.
- , *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Sasongko, Haryo, HD., *Kerukunan Beragama, Daulat politik, & Kereta Reformasi*. Jakarta: Harapan Baru Raya, 2005.
- Sermada, Donatus, *Pengantar Ilmu Perbandingan Agama*. Malang: Pusat Publikasi Widya Sasana, 2011.

Sugiharto, Bambang, I. dan Agus Rachmat. *Wajah Baru Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Sunardi, St., *Keselamatan, Kapitalisme, Kekerasan*. Yogyakarta: LkiS, 1996.

Tyas, Legowo. *Nouwen; Dari Kuasa ke Belarasa*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

END NOTES

- ¹ Donatus, Sermada, Fundamentalisme Agama, dalam Armada Riyanto, (Ed.), *Agama anti Kekerasan: Membangun Iman yang Merangkul*. (Malang: Dioma, 2000), h. 57.
- ² St. Sunardi, *Keselamatan, Kapitalisme, Kekerasan*. (Yogyakarta: LKis, 1996), h. 65-66.
- ³ Josep Ratzinger, Nalar dan Iman, Pertukaran Timbal Balik untuk Membangun Suatu Etika Umum dalam Giancarlo Bosetti (Ed.), *Iman Melawan Nalar*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 67.
- ⁴ Donatus Sermada, *Pengantar Ilmu Perbandingan Agama*, hlm. 133.
- ⁵ Sasongko, Haryo, HD., *Kerukunan Beragama, Daulat Politik, & Kereta Reformasi*. (Jakarta: Harapan Baru Raya, 2005), hlm. 19-20.
- ⁶ Gus Dur, *Sumbangan Agama-agama Dalam Menopang Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik Indonesia* dalam Pradjarta Dirjosanjoto (Eds.), *Op. Cit.*, hlm. 9.
- ⁷ Tyas Budi Legowo, *Nouwen; Dari Kuasa Ke Belarasa*. (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 142
- ⁸ M. Syafi'i Anwar, *Ketika Pluralisme Diharamkan dan Kebebasan Berkeyakinan Dicederai*, dalam Elza Peldi Taher (Ed.) *Merayakan Kebebasan Beragama*. (Jakarta: ICRP, Kompas, 2009), hlm. 433-434.